



**PEMERINTAH  
KOTA DUMAI**

**Rencana Kerja  
RENJA**

**2025**

**DISKOMINFOTIKSAN**

Gedung Lt.II Mall Pelayanan Publik  
Jalan H.R.SOEBRANTAS  
Kel. Teluk Binjai – Kec. Dumai Timur  
Kota Dumai

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi indikator target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih belum sempurna, tetapi yang tersaji didalam dokumen ini kami anggap dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Kami juga mohon maaf jika dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Dumai, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA DUMAI



**Drs. H. KHAIRIL ADLI, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700511 199101 1 001

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI TAHUN 2023</b>	<b>9</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan Kedua	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	33
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	38
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.	65
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN OPD</b>	<b>66</b>
	3.1 Tealaahan terhadap Kebijakan Nasional	66
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	68
	3.3 Program dan Kegiatan	70
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>103</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>107</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tidak memenuhi target Tahun 2023
Tabel 2.2	Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan telah memenuhi target Tahun 2023
Tabel 2.3	Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan telah melebihi target Tahun 2023
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
Tabel 2.5	Predikat Indeks SPBE
Tabel 2.6	Hasil Perolehan Nilai Indeks SPBE Tahun 2023
Tabel 2.7	Alokasi Bandwith Tahun 2023
Tabel 2.8	Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2022 & 2023
Tabel 2.9	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023 (TC.29)
Tabel 2.10	Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023 (TC.30)
Tabel 2.12	Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Tabel 2.13	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 (TC.31)
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (TC.32)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan dalam mendukung organisasi adalah perencanaan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman

kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persan Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persan Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Renja perangkat daerah 2025 mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 yakni, **“MELAKUKAN PEMANTAPAN TERHADAP SISTEM, SARANA, POTENSI, DAN SUMBER DAYA PENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN KOTA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA PEMAJUAN BUDAYA MELAYU (DUMAI KOTA IDAMAN)”**.

Penyusunan Renja perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan RKPD yang akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D), Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2025.

#### **2. Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 adalah :

- ✓ Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan

- berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- ✓ Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025;
  - ✓ Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana kerja (Renja), proses penyusunan Renja, serta keterkaitan antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir dokumen RKPD Kota Dumai tahun 2025.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Daerah Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan TW II.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Indikator Kinerja pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

### **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional**

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

**3.3. Program dan Kegiatan**

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KOTA DUMAI TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perandian Kota tahun lalu dan Capaian Indikator Renstra.**

Hasil evaluasi merupakan data dan informasi terkait permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun lalu. Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun lalu dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan target dengan capaian dalam satuan angka dan persentase.

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil pengukuran pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pencapaian Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Realisasi Program/Kegiatan**  
**yang tidak memenuhi Target Kinerja Tahun 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL
<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	-	-	-
<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota</b>			
Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	-	-	-
<b>Program Aplikasi Informatika</b>			
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi			
<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat &amp; Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>			
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	-
<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>			
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>			
Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	-	-	-
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	-	-	-

Dari Tabel 2.1 diatas bisa dilihat bahwa tidak ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target pada Tahun Anggaran 2023, semua Program/Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta Anggaran yang Memadai.

Pencapaian Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Realisasi Program/Kegiatan**  
**yang telah memenuhi Target Kinerja Tahun 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL
<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Keberhasilan Program dalam capaian target kinerja telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penyebab keberhasilannya adanya dukungan atau arahan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang terkait penyampaian Informasi ke Publik untuk lebih cepat, transparan dan tepat sasaran.	Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target program terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program ini, yang mana Program ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai tusi untuk penyampaian informasi pemerintah daerah yang optimal.	Perlunya Pengoptimalan Anggaran untuk ditahun berikutnya guna kerjasama terhadap media, pembelanjaan pendukung sapsras Publikasi baik secara online,offline maupun elektronik sebagai Penunjang dari Program Informasi dan Komunikasi Publik.
<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota</b>			
Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	Keberhasilan Kegiatan dalam capaian target kinerja telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penyebab keberhasilannya adanya dukungan atau arahan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang terkait pelaksanaan Kegiatan Informasi ke Publik untuk lebih cepat, transparan dan tepat sasaran.	Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Kegiatan ini terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program yang turunannya ke kegiatan ini, yang mana Kegiatan ini merupakan salah satu penunjang dari Indikator Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik yang melaksanakan tusi untuk kerja sama antar media online,offline dan elektronik serta sapsras sebagai pendukung kegiatan agar lebih optimal.	Untuk Kebijakan yang harus dilakukan pada kegiatan ini ditahun berikutnya adalah memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada program ini yang mana adanya pergantian/Perubahan pada Sub-Sub kegiatan ini yang menyesuaikan dengan Aplikasi SIPD-RI sehingga Pagu yang ada di sub kegiatan sebelumnya dapat dialokasikan pada Sub Kegiatan terbaru sebagai Penunjang dari Kegiatan ini.
<b>Program Aplikasi Informatika</b>			

<p>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi</p>	<p>Keberhasilan Program dalam capaian target kinerja telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penyebab keberhasilannya adanya dukungan atau arahan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam memaksimalkan Jaringan dan Penyebaran Bandwith ke Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Dumai dan Peningkatan Layanan SPBE dalam mewujudkan pelayanan digitalisasi dan mempermudah Akses Pelayanan Publik.</p>	<p>Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target program terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program ini, yang mana Program ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai tusi untuk Penyebaran Jaringan keseluruhan layanan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan Peningkatan Pelayanan Digitalisasi yang lebih optimal.</p>	<p>Perlunya Peningkatan Anggaran untuk tahun berikutnya guna Peningkatan Kapasitas jaringan agar lebih maksimal, dan juga untuk mendukung penuh peningkatan Layanan Digitalisasi yang menjadi salah satu program Kepala Daerah untuk mewujudkan Layanan SPBE. serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk pengaplikasian layanan dan koneksi jaringan lebih aman dan optimal.</p>
<p><b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat &amp; Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</b></p>			
<p>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p>	<p>Keberhasilan dalam pelaksanaan Kegiatan ini merupakan adanya dukungan Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Jajaran, Operator jaringan serta Teknisi yang tersertifikasi, Provider yang menjadi mitra Diskominfo serta Penganggaran yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan ini mampu dimaksimalkan.</p>	<p>Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Kegiatan terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program turunan pada kegiatan ini, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu pendukung Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai tusi untuk Penyebaran Jaringan keseluruhan layanan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang lebih optimal.</p>	<p>Perlunya Peningkatan Anggaran untuk tahun berikutnya guna Peningkatan Kapasitas jaringan agar lebih maksimal, dan juga untuk mendukung penuh peningkatan Layanan Digitalisasi yang menjadi salah satu program Kepala Daerah untuk mewujudkan Layanan digitalisasi berbasis elektronik. serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk pengaplikasian layanan dan koneksi jaringan lebih aman dan optimal.</p>
<p><b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b></p>			
<p>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p>	<p>Keberhasilan dalam pelaksanaan Kegiatan ini merupakan adanya dukungan Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Jajaran, Tenaga Ahli dan Programmer yang</p>	<p>Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Kegiatan terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program turunan pada</p>	<p>Perlunya Peningkatan Anggaran untuk tahun berikutnya guna Peningkatan mendukung penuh peningkatan Layanan Digitalisasi yang menjadi salah satu program Kepala Daerah untuk mewujudkan Layanan digitalisasi berbasis</p>

	<p>mengelola langsung dalam pembuatan, sosialisasi pengaplikasian yang tersertifikasi, seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra Diskominfo dan serta Penganggaran yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan ini mampu dimaksimalkan.</p>	<p>kegiatan ini, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu pendukung Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai Peningkatan Pelayanan Digitalisasi yang berbasis elektronik yang lebih optimal.</p>	<p>elektronik. serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk pengaplikasian layanan dan lebih aman dan optimal.</p>
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>			
<p>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p>	<p>Keberhasilan dalam pelaksanaan program ini adanya dukungan vertikal di instansi Pengelola, Tenaga operator Pelaksana Statistik sektoral dan seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai mitra Diskominfo sehingga pelaksanaan Program ini mampu mencapai target.</p>	<p>Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Program terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program ini, yang mana ini juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai Peningkatan Penyelenggaraan Statistik sektoral pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang lebih optimal dan terstruktur.</p>	<p>Perlunya Peningkatan Anggaran untuk ditahun berikutnya guna Peningkatan SDM yang dimana perlu untuk kebutuhan menjadi pendukung berjalannya Statistik sektoral agar lebih maksimal, serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk digunakan keperluan terkait statistik lebih aman dan optimal.</p>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<p>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p>	<p>Keberhasilan dalam pelaksanaan Kegiatan ini adanya dukungan vertikal di instansi Pengelola, Tenaga operator Pelaksana Statistik sektoral dan seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai mitra Diskominfo sehingga pelaksanaan Kegiatan ini mampu mencapai target.</p>	<p>Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Kegiatan terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program yang menjadi turunan pada kegiatan ini, yang mana kegiatan ini juga merupakan salah satu pendukung Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai Peningkatan Penyelenggaraan Statistik sektoral pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota</p>	<p>Perlunya Peningkatan Anggaran untuk ditahun berikutnya guna Peningkatan SDM yang dimana perlu untuk kebutuhan menjadi pendukung berjalannya Statistik sektoral agar lebih maksimal, serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk digunakan keperluan terkait statistik lebih aman dan optimal.</p>

		Dumai yang lebih optimal dan terstruktur.	
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>			
Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Keberhasilan dalam pelaksanaan program ini adanya dukungan vertikal di instansi Pengelola, Tenaga operator Pelaksana Persandian untuk Pengamanan dan seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai mitra Diskominfo sehingga pelaksanaan Program ini mampu mencapai target.	Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Program terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program ini, yang mana ini juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai tisi untuk Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang lebih optimal dan terstruktur.	Perlunya Peningkatan Anggaran untuk ditahun berikutnya guna Peningkatan dan Penambahan SDM yang dimana perlu untuk kebutuhan menjadi pendukung berjalannya Pengamanan Informasi agar lebih maksimal Pengamanannya, serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk digunakan keperluan terkait Pengamanan lebih aman dan optimal.
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Keberhasilan dalam pelaksanaan Kegiatan ini adanya dukungan vertikal di instansi Pengelola, Tenaga Ahli/operator Pelaksana untuk pengamanan Informasi dan seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai mitra Diskominfo sehingga pelaksanaan Kegiatan ini mampu mencapai target.	Dampak/Implikasi keberhasilan dari tercapainya target Program terhadap Renstra yaitu terealisasinya target Renstra yang menjadi acuan kinerja dari Program ini, yang mana ini juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Diskominfo yang mempunyai tisi untuk Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang lebih optimal dan terstruktur.	Perlunya Peningkatan Anggaran untuk ditahun berikutnya guna Peningkatan SDM yang dimana perlu untuk kebutuhan menjadi pendukung berjalannya Pengamanan untuk informasi agar lebih maksimal dan terjamin keamanannya, serta pembelanjaan Saprass pendukung untuk digunakan keperluan terkait Pengamanan Website dan aplikasi lebih aman dan optimal.

Dari Tabel 2.2 diatas bisa dilihat bahwa seluruh Program/Kegiatan telah memenuhi target pada Tahun Anggaran 2023, semua Program/Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta Anggaran yang Memadai.

Adapun Pencapaian Realisasi Program/Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Capaian Realisasi Program/Kegiatan**  
**yang melebihi Target Kinerja Tahun 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL
<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	-	-	-
<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota</b>			
Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	-	-	-
<b>Program Aplikasi Informatika</b>			
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Keberhasilan Program dalam capaian target kinerja telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana Akses internet yang menjadi indikatornya telah tersebar di Lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai bahkan sudah menyentuh daerah terpencil penyebaran jaringan internet dan juga Pelayanan Digitalisasi berbasis elektronik (SPBE) mengalami peningkatan yang signifikan dan menjadi terbaik I se-Provinsi Riau .penyebab keberhasilannya adanya dukungan atau arahan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam memaksimalkan Jaringan dan Penyebaran Bandwith ke Perangkat Daerah, unit pelayanan Pemerintah, lembaga pemerintah dan tempat keramaian di Lingkup Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan pelayanan digitalisasi dan mempermudah Akses Pelayanan Publik.	Telah melebihi target turunan dari Dokumen Perubahan Renstra Diskominfo 2021-2026, sehingga pelaksanaan dari program ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.	Perlu penambahan Anggaran pada program ini untuk memaksimalkan dan mempertambah kecepatan kapasitas internet dan penyedia jaringan internet untuk daerah yang belum tersentuh pada tahun sebelumnya guna untuk lebih megoptimalkan ketersediaan jaringan internet serta untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi yang berbasis elektronik yang menjadi program prioritas pemerintah daerah. Yang mana pelayanan digitalisasi berbasis elektronik (SPBE) sudah menjadi yang terbaik se-Provinsi Riau dengan Indeks tertinggi sehingga perlu anggaran pendukung agar tetap konsisten dan lebih optimal.
<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat &amp; Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>			

<p>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p>	<p>Keberhasilan Kegiatan ini dalam capaian target kinerja telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana Akses internet yang menjadi indikatornya telah tersebar di Lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai bahkan sudah menyentuh daerah terpencil penyebaran jaringan internet. penyebab keberhasilannya adanya dukungan atau arahan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam memaksimalkan Jaringan dan Penyebaran Bandwith ke Perangkat Daerah, unit pelayanan Pemerintah, lembaga pemerintah dan tempat keramaian di Lingkup Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan pelayanan digitalisasi dan mempermudah Akses Pelayanan Publik.</p>	<p>Telah melebihi target turunan dari Dokumen Perubahan Renstra Diskominfo 2021-2026, sehingga pelaksanaan dari Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p>	<p>Perlu penambahan Anggaran pada Kegiatan ini untuk memaksimalkan dan mempertambah kecepatan kapasitas jaringan internet untuk daerah yang belum tersentuh pada tahun sebelumnya guna untuk lebih megoptimalkan ketersediaan jaringan internet serta untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi yang berbasis elektronik yang menjadi program prioritas pemerintah daerah. Yang mana pelayanan digitalisasi berbasis elektronik (SPBE) sudah menjadi terbaik I se-Provinsi Riau dengan Indeks tertinggi sehingga perlu anggaran pendukung agar tetap konsisten dan lebih optimal.</p>
<p><b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b></p>			
<p>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p>	<p>Keberhasilan Kegiatan ini dalam capaian target kinerja telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu yang menjadi IKU Kota Dumai yaitu Indeks Layanan SPBE. di tahun 2023 ini IKU ini mengalami Peningkatan yang sangat Signifikan menjadi terbaik I dan Indeks Tertinggi se-Provinsi Riau. Dan kegiatan ini merupakan pendukung dari IKU tersebut, keberhasilan dari kegiatan ini dikarenakan adanya Dukungan Vertikal dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang Terkait serta kerja keras Tim dari Tim Pelaksana SPBE dan Tenaga Ahli serta Programmer yang dimiliki Diskominfo Kota Dumai.</p>	<p>Telah melebihi target turunan dari Dokumen Perubahan Renstra Diskominfo 2021-2026, sehingga pelaksanaan dari Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p>	<p>Dengan keterbatasan Anggaran yang dimiliki kegiatan ini, namun tidak membuat surut semangat dan kerjakeras Tim untuk meningkatkan Pelayanan Digitalisasi atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang berhasil meningkatkan Nilai Indeksnya. Oleh karena itu, perlu adanya Peningkatan Anggaran agar dapat mempertahankan bahkan lebih meningkatkan SPBE ini agar Pelayanan Digitalisasi Pemerintah yang berbasis elektronik bisa bersaing dikancah Nasional ditahun berikutnya.</p>
<p><b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b></p>			
<p>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p>	<p>Keberhasilan dari Program dan Kegiatan</p>		<p>Dengan keterbatasan Anggaran yang dimiliki</p>

<p><b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p>ini dalam Capaian Target Kinerja telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana Program dan Kegiatan ini merupakan IKU dari Diskominfo yang mempunyai tusi untuk Pengumpulan, Pengelolaan, Monitoring data Statistik Sektoral diseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai secara Sistematis dan terstruktur. Faktor keberhasilan yang dicapai Program dan Kegiatan ini adanya arahan dan evaluasi dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan tenaga Ahli/Pelaksana/Operator Penyelenggara Statistik Sektoral.</p>	<p>Telah melebihi target turunan dari Dokumen Perubahan Renstra Diskominfo 2021-2026, sehingga pelaksanaan dari Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p>	<p>Program dan kegiatan ini, namun tidak membuat surut semangat dan kerjakeras Tim untuk meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Oleh karena itu, perlu adanya Peningkatan Anggaran segar demi mempertahankan bahkan lebih meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini agar Pelaksanaan Statistik ini mampu memberikan hasil yang terbaik di kancah Provinsi maupun Nasional.</p>
<p><b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b></p>			
<p>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</p>	<p>Keberhasilan dari Program dan Kegiatan ini dalam Capaian Target Kinerja telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yang mana Program dan Kegiatan ini merupakan IKU dari Diskominfo yang mempunyai tusi untuk Pengamanan Persandian untuk Informasi diseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai secara digitalisasi. Faktor keberhasilan yang dicapai Program dan Kegiatan ini adanya arahan dan evaluasi dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan tenaga Ahli/Pelaksana/Operator Pengamanan Persandian.</p>	<p>Telah melebihi target turunan dari Dokumen Perubahan Renstra Diskominfo 2021-2026, sehingga pelaksanaan dari Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p>	<p>Dengan keterbatasan Anggaran yang dimiliki Program dan kegiatan ini, namun tidak membuat surut semangat dan kerjakeras Tim untuk meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan. Oleh karena itu, perlu adanya Peningkatan Anggaran segar demi mempertahankan bahkan lebih meningkatkan Pengamanan database yang menggunakan software yang mempunyai legalitas dan tingkat keamanan yang tinggi agar Pelaksanaan Pengamanan ini mampu memberikan hasil yang terbaik di kancah Provinsi maupun Nasional.</p>
<p><b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</p>		

Dari Tabel 2.3 diatas bisa dilihat bahwa beberapa Program/Kegiatan yang telah melebihi target pada Tahun Anggaran 2023 yaitu, Program Aplikasi Informatika yang mempunyai 2 Kegiatan sebagai pendukung dari Program serta Indikator Kinerja Utama (IKU)Pemerintah Kota Dumai dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang mempunyai masing-masing 1 kegiatan, juga merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. semua

Program/Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan serta Anggaran yang Memadai.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,85	3,43	120,35
Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Akses	94	221	235
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di sampaikan melalui Media	Persen	88	88	100
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	75	80	106,66
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	75	80	106,66

Capaian keberhasilan dari 5 (Lima) indikator kinerja sasaran diatas karena didukung dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

### 1. Indeks Layanan SPBE

Target dari Indikator Kinerja sasaran tersebut adalah memperoleh nilai Indeks layanan SPBE sebesar 2,85 dengan realisasi 3,43 atau capaian sebesar 120,35%. Pencapaian target tersebut sudah memenuhi target bahkan melebihi target yang ditelaah ditetapkan pada tahun 2023 dan menjadi tertinggi se- Provinsi Riau, dengan mendapatkan Predikat Baik. Nilai indeks layanan SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Predikat Indeks SPBE**

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator Internal instansi Pusat/Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**Tabel 2.6**  
**Hasil perolehan nilai indeks SPBE Kota Dumai Tahun 2023**

Domain/Aspek Penilaian	Nilai
<i>Domain kebijakan SPBE</i>	<b>3,10</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Domain Tata Kelola SPBE</i>	<b>3,10</b>
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75
Penyelenggaraan SPBE	2,50
<i>Domain Manajemen SPBE</i>	<b>2,73</b>
Penerapan Manajemen SPBE	2,63
Audit TIK	3,00
<i>Domain Layanan SPBE</i>	<b>3,96</b>
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50
<b>INDEKS SPBE</b>	<b>3,43</b>
<b>Predikat SPBE</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan hasil perolehan nilai tersebut diatas, Kota Dumai mengalami kenaikan berada di Peringkat Pertama se-Provinsi Riau dengan nilai 3,43. Terlepas dari itu semua, target Indeks Layanan SPBE dapat tercapai bahkan melampaui target untuk tiga tahun kedepan karena adanya dukungan, perhatian dan bimbingan dari Kepala Daerah, Kepala Diskominfo beserta jajaran dan Mitra-mitra yang menjadi bagian dari Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Support dari Instansi Pemerintah Daerah terkait. Hasil capaian Indeks SPBE Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2023 senilai 3,43 hasil ini meningkat dibandingkan pada tahun 2022 dengan indeks senilai 2,63. Hasil penilaian terhadap penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Dumai telah mencapai target dengan predikat “Baik”. Di sisi lain, Pemerintah Kota Dumai masih perlu melakukan peningkatan pada setiap Domain/Indikator SPBE sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

## 2. Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 94 Titik Akses yang terkoneksi ke jaringan internet dengan realisasi capaian pada tahun 2023 sebanyak 221 Titik Akses

atau sebesar 120,35 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Aplikasi Informatika yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang saling berkaitan.

Kegiatan Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah ini merupakan kegiatan yang menyediakan koneksi jaringan internet kepada OPD dan Perangkat Daerah lainnya serta melakukan pembinaan dan pengembangan dalam hal pengelolaan jaringan internet. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Titik Akses seperti OPD dan Perangkat Daerah lainnya yang disediakan Pemerintah Daerah dengan target 94 Titik Akses terealisasi sebanyak 221 Titik akses yang terdiri dari OPD dan Perangkat Daerah lainnya diluar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase penerapan aplikasi e-Government. Selain itu, terdapat juga Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik.

**Tabel 2.7**  
**Alokasi Bandwith Internet Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>LOKASI/OPD</b>	<b>TITIK AKSES</b>
1	SETDA	18
2	BPKAD	12
3	BAPPEDA	7
4	DINKES	1
5	BKPSDM	3
6	DPRD	12
7	KESBANGPOL	7
8	PERKIM	5
9	INSPEKTORAT	6
10	DISPERSIP	6
11	BAPENDA	3

12	DISDIK	1
13	DISKOMINFO	8
14	DLH	6
15	DPMPTSP	6
16	LPSE/OLT II KANTOR ATAS	1
17	DISKOPAR	4
18	PUPR	1
19	DISHUB	1
20	PERLINDUNGAN ANAK	9
20	DISPERDAG	5
21	DISNAKER	6
22	DPKUKM	3
23	BPBD	4
24	DINSOS	4
25	SATPOL PP	4
26	CAPIL	6
27	UKM	1
28	PARIWISATA	1
29	KECAMATAN BUKIT KAPUR	3
30	KECAMATAN DUMAI BARAT	4
31	KECAMATAN DUMAI KOTA	2
32	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1
33	KECAMATAN DUMAI TIMUR	2
34	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	3
35	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	2
36	KELURAHAN BAGAN BESAR	1
37	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	1
38	KELURAHAN BUKIT NENAS	1
39	KELURAHAN BAGAN KELADI	1
40	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	1
41	KELURAHAN PURNAMA	1
42	KELURAHAN STDI	1
43	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	1
44	KELURAHAN LAKSAMANA	1
45	KELURAHAN DUMAI KOTA	1
46	KELURAHAN BINTAN	1
47	KELURAHAN SUKAJADI	1
48	KELURAHAN BUKIT DATUK	1

49	KELURAHAN MEKAR SARI	1
50	KELURAHAN BUKIT TIMAH	1
51	KELURAHAN RATU SIMA	1
52	KELURAHAN BUMI AYU	1
53	KELURAHAN BUKIT BATREM	1
54	KELURAHAN BULUH KASAP	1
55	KELURAHAN JAYA MUKTI	1
56	KELURAHAN TANJUNG PALAS	1
57	KELURAHAN TELUK BINJAI	1
58	KELURAHAN GUNTUNG	1
59	KELURAHAN PELINTUNG	1
60	KELURAHAN MUNDAM	1
61	KELURAHAN TELUK MAKMUR	1
62	KELURAHAN BANGSAL ACEH	1
63	KELURAHAN LUBUK GAUNG	1
64	PUSKESMAS DUMAI KOTA	1
65	PUSKESMAS BUMI AYU	1
66	PUSKESMAS DUMAI BARAT	1
67	PUSKESMAS JAYA MUKTI	1
68	PUSKESMAS PURNAMA	1
69	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	1
70	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	1
71	PUSKESMAS SEI SEMBILAN	1
72	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	1
73	RSUD	2
74	MEDIA CENTER	1
75	PENDOPO	2
76	UPT DPPP	1
77	DISHUBKIR	1
78	LAB DINKES	1
79	GUDANG OBAT	1
80	LAM	1
81	DAMKAR	1
82	POS BELAKANG	1
83	POS SAMPING	1
84	POS DEPAN	1
85	TUGU	1
86	Tourist Information Center(TIC)	1

TOTAL OPD/KELURAHAN/PUSKEMAS/GEDUNG LAINNYA/PUSAT KERAMAIN	TOTAL TITIK AKSES
86	221

#### 4. **Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan Melalui Media.**

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 88% Informasi Pemerintah Daerah yang di sampaikan Melalui Media dengan realisasi capaian pada tahun 2023 sebanyak 100% atau sebesar 88%. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut terealisasi dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program kerjasama informasi dengan massa media.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah yang dilaksanakan selama tahun 2023. Adapun indikator untuk kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 4 jenis publikasi. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kerjasama media pada tahun 2022 ini terdiri dari 15 (Sepuluh) media cetak, 70 (Tujuh Puluh) media online dan 2 (Dua) media televisi dan 1 (Satu) Media Radio.

Perbandingan realisasi pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini;

**Tabel 2.8**  
**Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2022 & 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN (%)
Indeks Layanan SPBE	Indeks 2,63	Indeks 3,43	130,41%
Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	111 Akses	221 Akses	199,09%
Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang di sampaikan melalui Media	88%	88%	100 %
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	80%	106,66%
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75%	80%	106,66%

Analisa penyebab keberhasilan dari indikator sasaran tersebut karena didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Terkait Permasalahan terhadap capaian indikator kinerja sasaran khususnya pada indikator Kategori e-government atau indeks SPBE Kota Dumai, dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh evaluator dari Kemenpan, terdapat sejumlah peningkatan yang sangat signifikan pada kategori indeks dan menjadi Indeks tertinggi se-Provinsi Riau.

Sehubungan dengan tersebut, perlu dilakukan Peningkatan penataan SPBE agar dapat mempertahankan capaian indeks bahkan Meningkatkan nilai Indeks SPBE agar menjadi Kategori/Predikat “Sangat Baik” atau “Memuaskan”.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD dapat dilihat Pada tabel dibawah ini;

**Tabel 2.9**  
**T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Provinsi Riau Kota Dumai**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
2	16	01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian</b>	<b>100%</b>									
2	16	01	2	0	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>9 Dokumen</b>	-	<b>10 Dokumen</b>				
2	16	01	2	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	3 Dokumen	-	-	-	
2	16	01	2	0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

2	16	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	16	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	-	<b>3 Dokumen</b>					
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	-	14 Bulan	12 Bulan	85,71%	14 Bulan	14 Bulan	100%
2	16	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	16	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	-	<b>3 Dokumen</b>					
2	16	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	-						
2	16	01	2	05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	70 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0

2	16	01	2	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	-	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%
2	16	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	<b>1 Dokumen</b>					
2	16	01	2	06	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	-	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%
2	16	01	2	06	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	-	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%
2	16	01	2	06	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2	16	01	2	06	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2	16	01	2	06	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54 Unit</b>	-	<b>54 Unit</b>					
2	16	01	2	07	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2	16	01	2	07	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2	07	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	-	-	-
2	16	01	2	07	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	-	51 Unit	51 Unit	100%	38 Unit	38 Unit	100%
2	16	01	2	07	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	-	<b>3 Laporan</b>					

2	16	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56 Unit</b>	<b>-</b>						
2	16	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	16	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2	16	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	-	50 Unit	50 Unit	100%	52 Unit	52 Unit	100%
2	16	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2	16	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	16	02	2	01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	16	02	2	01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	16	02	2	01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	16	02	2	01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	02	2	01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	-	-	4 Layanan	4 Layanan	100%	3 Layanan	3 Layanan	100%
2	16	02	2	01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
2	16	02	2	01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

2	16	02	2	01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
2	16	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi</b>	-	-	63,03%					
2	16	03	2	01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	-	-	86 Unit					
2	16	03	2	01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	03	2	01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Website Pemko Dumai yang dikelola	-	-	5 Website	5 Website	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	03	2	01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	86 Unit	86 Unit	100%	100 Unit	100 Unit	100%
2	16	03	2	02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	-	-	3 Dokumen					
2	16	03	2	02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	03	2	02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	03	2	02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2	16	03	2	02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	03	2	02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	100%	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	100%
2	16	03	2	02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	-	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2	16	03	2	02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem	-	-	-	-	-	3 Layanan	3 Layanan	100%

							Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									
2	16	03	2	0	00	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	16	03	2	0	00	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	03	2	0	00	11	Pengelolaan GCIO	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	03	2	0	00	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	20	02					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>80%</b>	-	<b>75%</b>					
2	20	02	2	0	01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>	-	-	<b>1 Dokumen</b>					
2	20	02	2	0	00	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	20	02	2	0	00	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	20	02	2	0	00	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20	02	2	0	00	02	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah kapasitas SDM dalam peningkatan statistik sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20	02	2	0	00	04	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Peningkatan pelayanan kelembagaan statistik sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-
2	21	02					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	-	-	<b>75%</b>					
2	21	02	2	0	01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	21	02	2	0	00	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	21	02	2	0	00	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	-	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	100%	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	100%
2	21	02	2	0	00	02	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-

						informasi pemerintah daerah kabupaten/Kota	Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	21	02	2	01	0001	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-



Dumai, Januari 2024  
Kepala Dinas,

**Drs.H.KHAIRIL ADLI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700511 199101 1 001

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target program Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kota Dumai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Terjaganya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah.
- c. Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- a. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun stakeholders dalam mensinkronkan dan menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Mengoptimalkan peran kontrol internal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika ditingkat kebijakan nasional diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah **“Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Program prioritas pembangunan daerah Kota Dumai untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini:

**Tabel 2.10**

**Tabel Tujuan, sasaran RPJMD dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 yang terkait Dinas Komunikasi dan Informatika**

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintah Daerah yang Baik					
Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target 2025	Program Prioritas
Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	1. Indeks layanan SPBE  2. Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah  3. Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)  4. Persentasae Penyelenggaraan Statistik Sektoral  5. Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3,1  71,43 %  86%  80%  100%	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pembangunan dari sisi komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai ke depan, baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2022–2026.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2022–2026 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Formulasi / Rumus	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1.	Indeks Layanan SPBE		Presentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen Arsitektur SPBE Kota Dumai	$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$	2.83	2.85	3	3.1	2.63	3.43	3	3.1	Diskominfo- tik san tidak melaksana- kan SPM/ standar nasional
2.	Persentase Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Diskominfo-tiksan	$\frac{\text{Jumlah Opd,upt,lpmk}}{\text{Titik Akses internet}} \times 100\%$	57,14%	63,03%	67,23%	68,91%	129,06%	245,55%	67,23%	68,91%	Diskominfo- tik san tidak melaksana- kan SPM/ standar nasional
3.	Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	Stunting	Persentase Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$	-	-	71%	86%	-	-	71%	86%	Diskominfo- tik san tidak melaksana- kan SPM/ standar nasional
4.	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan Melalui Media		Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	$\frac{\text{Target Indikator}}{\text{Realisasi Informasi yang disampaikan melalui media}} \times 100\%$	85%	88%	-	-	85%	88%	-	-	Diskominfo- tik san tidak melaksana- kan SPM/

													standar nasional
5.	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yg menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	75	75	80	80	75	80	80	80	Diskominfotiksan tidak melaksanakan SPM/standar nasional
6.	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Per area keamanan Informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	75	75	80	80	75	80	80	80	Diskominfotiksan tidak melaksanakan SPM/standar nasional

Terkait capaian indikator kinerja kategori indeks Layanan SPBE Kota Dumai yang sudah melebihi target capaian indikator, dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh evaluator dari Kemenpan, terdapat target untuk 3 (tiga) tahun kedepan yang sudah terlewati.

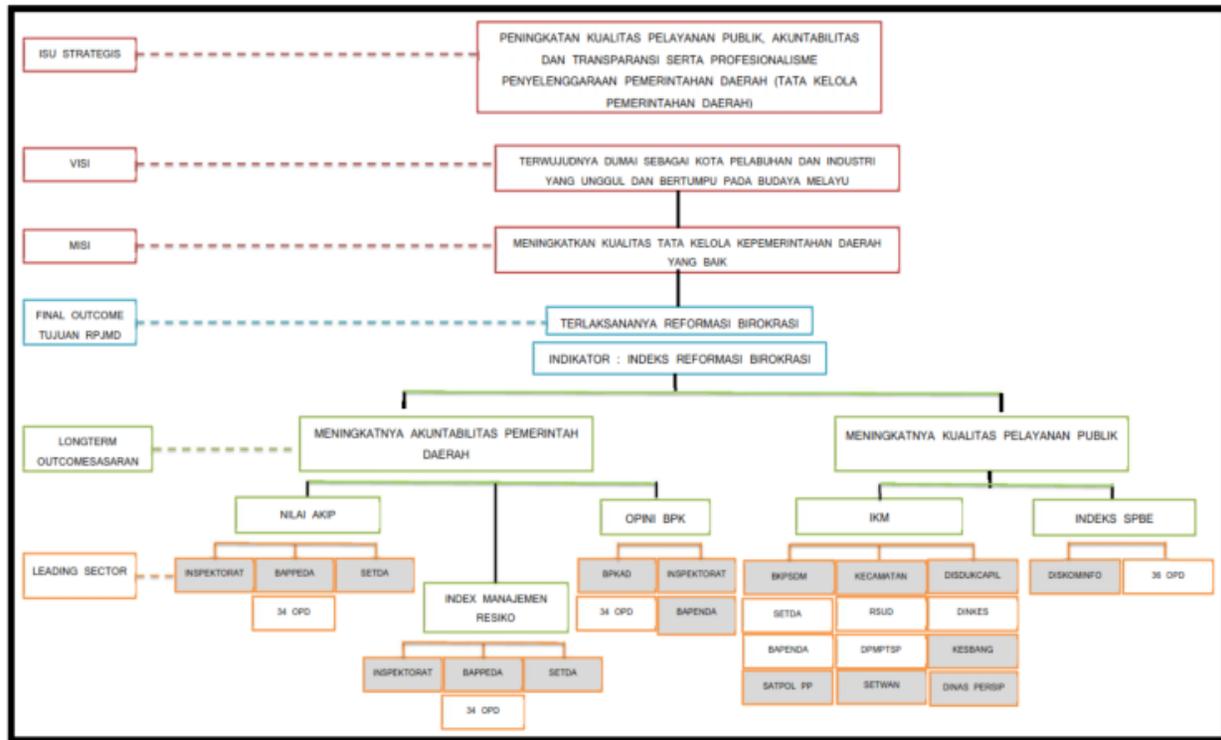
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Peningkatan penataan SPBE agar dapat mempertahankan atau lebih meningkatkan capaian ditahun sebelumnya dan dapat mencapai predikat “Sangat Baik” & “Memuaskan”. serta dukungan anggaran yang memadai, Materplan SPBE ini akan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Dumai kedepan.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai memiliki Peran yang sangat krusial dalam pemenuhan Misi 4 dari penjabaran Rencana Strategis Pemerintah Kota Dumai yang di jabarkan dalam Visi, Misi Kota Dumai, yaitu “ Meningkatkan Kualitas tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik “ . Berikut dilampirkan Pemodelan Pencapaian Misi 4  
::



Pemodelan Pencapaian Misi 4\*)

Adapun 5 (lima) uraian mengenai Isu-Isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah sebagai berikut :

**1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tidak dapat di pungkiri bahwa berbagai kondisi yang ada di Bidang Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Dumai menghadapi berbagai tantangan saat ini untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Digitalisasi pada seluruh Perangkat Daerah yang harus di selesaikan.

Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang mempedomani sesuai dengan Pencapaian Misi ke- 4 yang mendukung Misi dari Pemerintah Kota Dumai. Secara tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah berhasil merealisasikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab untuk selalu

meningkatkan Pelayanan, berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan target-target yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mempunyai 5 (lima) Indikator kinerja sebagai Pendukung dalam Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Transparansi, dari ke 5 (lima) Indikator tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai terus meningkatkan kinerja dan telah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2023 dan target tiga tahun kedepan. Ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang sudah melewati batas target yaitu Indeks Layanan SPBE, Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah, Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang mana Indikator tersebut diatas juga bersinergi dengan Program Kementrian dan Lembaga Pusat serta Program Provinsi. Salah satu contoh Peningkatan Kinerja Pelayanan adalah Indeks Layanan SPBE, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah berhasil meningkatkan Angka Indeks nya dari tahun sebelumnya 2,63 Indeks dan pada Tahun 2023 naik sangat signifikan 3,43 Indeks serta menjadi yang tertinggi Se- Provinsi Riau, Namun untuk Predikat masih pada kategori “Baik”. Ini akan terus menjadi Motivasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai untuk terus meningkatkan Kinerja dalam hal mengelola Pelayanan Digitalisasi yang akan disebar keseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai, dan untuk beberapa tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai juga akan meningkatkan Angka Nilai Indeks agar mendapatkan Predikat Kategori “Sangat Baik”.

## **2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Dumai menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang saat ini untuk meningkatkan Pelayanan Digitalisasi pada seluruh Perangkat Daerah yang harus di selesaikan melalui kebijakan dan kegiatan yang harus didukung oleh Komitmen stakeholder Pemerintah Kota Dumai.

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Dumai dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut:

## **A. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan sebagai Agen Informasi, berperan aktif mendistribusikan Informasi yang perlu diketahui Masyarakat, Sehingga Masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas Kelompok tersebut. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi tanggungjawab bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam hal Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk beberapa tahun kedepan. Perlu diketahui, bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini telah ada di beberapa tahun belakang dan pelaksanaannya pernah berjalan namun tidak efektif dan pasif dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang melanda di beberapa tahun belakang. namun setelah pandemi KIM ini menjadi Indikator Kinerja Utama yang menjadi perhatian khusus pelaksanaannya. Pada saat berjalannya KIM ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Dumai telah membentuk dan membina Kelompok Informasi Masyarakat di beberapa Kecamatan Pemerintah Kota Dumai . Pada Tahun 2022 Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Dumai sebanyak 13 KIM dan hanya 8 KIM yang terdaftar pada kanal web KIM Kementrian Kominfo RI.

## **B. Proses Bisnis**

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kota Dumai dalam aspek arsitektur proses bisnis dan pemetaan proses bisnis sudah mengalami peningkatan secara penilaian yang dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal dilakukan pendefinisian dan penetapan berdasarkan arahan dalam Peraturan Menteri PAN RB tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi No 93 tahun 2021. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Standarisasi Proses Bisnis Pelayanan Strategis merupakan tolak ukur yang wajib dilaksanakan oleh setiap unit Penyelenggara dalam rangka Kemudahan Pelayanan Publik. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis bertujuan agar instansi pemerintah mampu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mengkomunikasikan baik kepada Internal maupun Eksternal mengenai Proses Bisnis.

Untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dalam penilaian Indeks SPBE untuk aspek proses Inovasi Bisnis, Kota Dumai mendapatkan nilai 1,85 yang artinya sudah mengalami peningkatan namun masih dalam Rintisan dan Proses penerapan SPBE dilakukan proses perencanaan yang lebih terstruktur dan sewaktu-waktu. Dengan kondisi tersebut maka Kota Dumai perlu mendefinisikan Peta Proses Bisnis sesuai dengan panduan dari Peraturan Menteri PAN RB No 19 Tahun 2018.

### **C. Aplikasi**

Pengembangan Aplikasi di Kota Dumai pelan namun pasti sudah memenuhi kebutuhan semua urusan dan fungsi OPD. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai perlu melakukan Pengelolaan dan Maintenance untuk kebutuhan aplikasi yang lebih efisien dan menetapkan Operator-operator dalam pengembangan aplikasi di setiap OPD. Walaupun dalam penilaian indeks Layanan SPBE Kota Dumai mendapatkan nilai 3.43, Perlu ditingkatkan untuk Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE. Kebijakan tersebut sudah didukung dengan realisasinya baik dari pemenuhan kebutuhan, operasionalisasi dan standar pengembangannya. Namun yang menjadi permasalahan dan perlu perhatian khusus untuk meningkatkan SDM pengelola (Operator) yang menjadi kebutuhan setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Agar pelaksanaan pelayanan digitalisasi yang menggunakan Aplikasi berjalan dengan optimal.

### **D. Data dan Informasi**

Pengelolaan data dan informasi di lingkungan kota Dumai telah diatur dalam Peraturan Walikota No. 43 tahun 2019. Adapun aspek-aspek yang telah diatur adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sumber Data;
2. Prinsip satu data satu peta;
3. Penyelenggara satu data satu peta;
4. Penyelenggara satu data satu peta;

5. Strategi penyelenggaraan satu data satu peta;
6. Kerja sama;
7. Peran masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga penelitian;
8. Pembinaan;
9. Insentif dan disinsentif dan;
10. Pembiayaan.

#### **E. Sumber Daya Manusia**

Kondisi Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai walaupun belum mencukupi kebutuhan semua urusan dan namun sudah cukup untuk menunjang berjalannya SPBE, agar lebih sempurnanya perlu melakukan perekrutan SDM. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai perlu melakukan perekrutan SDM dan pelatihan SDM yang sesuai pada bidang Teknologi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### **F. Tata Kelola dan Manajemen SPBE**

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Sedangkan Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen SPBE berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 yaitu:

- Rencana Induk SPBE Nasional;
- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- Rencana dan anggaran SPBE;
- Proses Bisnis;
- Data dan informasi;
- Infrastruktur SPBE;
- Aplikasi SPBE;
- Keamanan SPBE; dan

- Layanan SPBE.

Dalam penerapan Tata Kelola ini Kota Dumai telah melaksanakan Pencapaian Sebagai berikut:

- a. Telah memiliki Buku Masterplan Smartcity Kota Dumai.
- b. Telah memiliki dokumen Rencana Induk/Arsitektur SPBE sudah menyesuaikan dengan panduan yang ditetapkan dalam Perpres 95/2018.
- c. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sudah mulai dilengkapi secara detail sesuai Perpres 95/2018.
- d. Perencanaan dan Anggaran SPBE sudah mulai dikoordinasikan agar bisa terintegrasi bukan hanya dari OPD Pengelola TIK.
- e. Pengelolaan Infrastruktur, Aplikasi, keamanan dan layanan mengalami peningkatan kapabilitas dan pengelolaan, hal ini tercermin dari perolehan Indeks SPBE yang cenderung meningkat bahkan saat ini Indeks Layanan SPBE Kota Dumai tahun 2023 telah memenuhi bahkan melebihi capaian target nasional (3,43) yaitu berpredikat “Baik”.

### **G. Pengelolaan Layanan**

Tujuan manajemen layanan SPBE adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Tujuan manajemen layanan SPBE tersebut dibentuk dari proses sebagai berikut:

1. Kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE;
2. Kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE;
3. Kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Sejalan dengan Kondisi Eksisting Aplikasi, pelaksanaan layanan aplikasi berdasarkan referensi arsitektur layanan nasional masih dalam tahap awal dan perlu peningkatan, Rekomendasi dan Insitif perbaikan Arsitektur Layanan SPBE :

- Melaksanakan Layanan SPBE berstandar Nasional dan Internasional yang selaras dengan Referensi Arsitektur Layanan Nasional

## **H. Infrastruktur**

Sejalan dengan Kondisi Eksisting Aplikasi, pelaksanaan layanan aplikasi berdasarkan referensi arsitektur layanan nasional masih dalam tahap awal dan perlu peningkatan, Rekomendasi dan Insitif perbaikan Arsitektur Layanan SPBE Melaksanakan Layanan SPBE berstandar Nasional dan Internasional yang selaras dengan Referensi Arsitektur Layanan Nasional.

Semua ini akan berjalan dengan baik yang memerlukan komitmen Bersama demi terwujudkan Visi Misi melalui penjabaran Perubahan RPJMD 2021-2026 yang menjadi acuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam mengimplementasikan menjadi program-program yang efektif, efisien dan akuntabel dengan tetap berorientasi layanan yang maksimal bagi seluruh warga Kota Dumai.

## **I. Statistik Sektoral**

Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan salah satu Penunjang dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Pada Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Walidata telah melaksanakan Forum Data Statistik Sektoral Kota Dumai yang diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Dumai. Yang menjadi Permasalahan pada Statistik Sektoral ini adalah Kurangnya SDM untuk pendukung kinerja Statistik, Sulitnya Pengumpulan Data dari Perangkat Daerah dikarenakan masih terdapat ego sektoral, Sumber Pendanaan yang kurang menjadi kendala untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya dan masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja Statistik.

## **J. Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Penyelenggaraan Persandian juga merupakan salah satu penunjang dari Peningkatan Pengamanan Data yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Kota Dumai. Penyelenggaraan Persandian ini sudah dilaksanakan untuk seluruh Perangkat Daerah Kota Dumai yang dilakukan dalam bentuk Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Keamanan dalam mendukung SPBE tahun 2023 yang dimanfaatkan dalam kesadaran pengamanan informasi oleh masing-masing perangkat daerah kota dumai, serta didukung oleh software perangkat atau aplikasi Lisensi Web Application Firewall (WAF) cloudflare guna untuk mencegah dan melindungi website pemerintahan Kota Dumai dari serangan cyber attack seperti cross-site-scripting (XSS), SQL Injection, DDoS Cross-Site-Forgery dan lain-lain. Kegiatan lainnya adalah melaksanakan sosialisasi cyberbullying yang ditujukan kepada siswa/i sekolah menengah pertama kota dumai sesuai dengan Perpres nomor 26 tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahan yang dihadapi Persandian ini adalah belum tersedianya alat/Aplikasi yang berlisensi untuk Menguji Tingkat Kerentanan (BUG) dari sebuah Aplikasi dan belum tersedianya alat pendekteksi dini serangan Cyber terhadap WebAplikasi server maupun pada jaringan. Kurangnya SDM dalam mendukung kinerja Persandian terutama untuk Jabatan fungsional Sandiman yang masih kosong, serta Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk meningkatkan Kinerja Pengamanan Informasi dan Sumber Pendanaan yang belum tercukupi.

### **3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai mempunyai tugas dan fungsi mendukung penuh Visi dan Misi ke – 4 Kepala Daerah yaitu “Meningkatkan Kualitas tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik” dengan turunan Misi tersebut yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, serta mendukung penuh yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Daerah yang sejalan dengan Program Pemerintah Pusat dan

Nasional/SPM salah satunya mengatasi “Stunting” yang pada saat ini menjadi Program Prioritas Nasional. Untuk mengatasi Permasalahan Pengentasan Angka Stunting ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, telah melakukan penyampaian dan penyebaran informasi terkait Stunting ke Masyarakat melalui Media cetak berupa Media Massa, Giant banner serta melakukan Penyampaian Informasi melalui Media Online dan Media Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Dumai yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai.

#### 4. Tantangan/Peluang dan Isu-Isu Penting Strategis

Sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di daerah, setelah memperhatikan Faktor Internal dan Eksternal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai maka disimpulkan Tantangan/Peluang dan Isu-Isu penting Strategis yang berkembang.

Berikut diuraikan Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara umum sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2021, yaitu :

**Tabel 2.12**

**Perumusan isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai**

NO	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
1.	Perumusan kebijaksanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E Government, Bidang Statistik dan Persandian;				

		<p>dimiliki Diskominfotiksan masih kurang sehingga bisa menyebabkan terkendalanya dan lambatnya dalam hal Pengoperasian TIK guna Pengoptimalnya pelayanan Digitalisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Aplikasi Umum SPBE di setiap perangkat daerah sudah terintegrasi namun pelaksanaannya belum maksimal karena minimnya SDM.</li> <li>- Kurangnya SDM/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian pada Bidang TIK sehingga memperlambat kinerja</li> <li>- Belum Optimalnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</li> <li>- Kurangnya Koordinasi berbagai Pihak dalam Penyelenggaraan data Statistik Sektoral guna Penyediaan data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan Statistik daerah</li> <li>- Perlunya Peningkatan sistem pengamanan pada jaringan Komunikasi dan sistem infomasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai</li> <li>- Kurangnya Saranan dan Prasarana bidang persandian serta belum ada SDM yang berkapasitas</li> </ul>	<p>kebutuhan akan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan keamanan sistem TIK</li> <li>- Belum optimalnya satu data yang terintegrasi</li> <li>- Masih rendahnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan Profesional Khususnya yang menguasai bidang IT (analisis, Aplikasi, Database, Pemograman dan Jaringan).</li> </ul> <p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan Teknologi Informasi</li> <li>- Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi</li> <li>- Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat</li> <li>- Adanya Partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial Antar pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat (Komunikasi)</li> <li>- Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta</li> <li>- Edukasi internet sehat dan aman yang cerdas,</li> </ul>	<p>dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantapan regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE</li> <li>- Belum optimalnya sistem integrasi data Statistik Sektoral daerah</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah</li> <li>- Kurangnya SDM bidang IT pada setiap bidang</li> </ul>	<p>dengan standarisasi agar memperlancar penyaluran akses internet, publikasi informasi, meningkatkan sentral SPBE, dan pengelolaan data statistik sektoral serta pengamanan informasi dan data se-Kota Dumai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka perekrutan SDM bidang IT sebagai penunjang jalannya digitalisasi pemerintah yang berbasis elektronik</li> <li>- Sangat diperlukan suntikan Anggaran yang memadai untuk dilaksakannya tugas pokok dan fungsi Diskominfotiksan dalam mendukung dan penunjang program Pemerintah Kota Dumai.</li> </ul>
--	--	--	---	--	---

		dalam persandian.	kreatif dan Produktif - Akuntabilitas dan Transparan dalam Penyelenggaraan Negara.		
--	--	-------------------	---	--	--

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai melakukan telaah terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi langsung terhadap akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika perkembangan kemajuan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang semakin baik, cepat dan transparan.

**Tabel 2.13**  
**T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	100%	4.986.235.884	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	100%	7.204.782.631	
2.16.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	51.737.408	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	85.500.000	
00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	
00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.400.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	

00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.953.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.000.000	
00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.575.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	
00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.187.708	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.000.000	
00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	33.107.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000	
00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	3.512.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	9.500.000	
<b>2. 16 .0 1. 2. 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3.792.813.240</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>4.059.282.631</b>	
00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan/orang	3.703.993.240	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan/orang	3.959.282.631	

00 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	38.820.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
00 03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	50.000.000	Penyesuaian Honorarium PPTK Kegiatan sesuai standar dan spesifikasi selama 12 bulan
2. 16 .0 1. 2. 03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>18.800.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>30.000.000</b>	
00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	
00 02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	
00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	30.000.000	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna BarangPengurus barang, Pembantu Pengurus Barang 12 bulan

2. 16 .0 1. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	51.360.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	280.000.000	
00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80.000.000	Pengadaan belanja pakaian dinas untuk keperluan hari besar HUT Kota Dumai, pakaian security dan pakaian dinas lapangan
00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	100.000.000	Diperlukan belanja Diklat untuk Keperluan Pejabat/Pimpi nan
						<b>- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>					
00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15 orang	51.360.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15 orang	100.000.000	Diperlukan Belanja Bimtek untuk sertifikasi pelaksana teknis
						<b>- Belanja Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>					
2. 16 .0 1. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	291.483.760	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	685.000.000	

00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.440.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	30.000.000	
00 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.581.100	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	Kurangnya persediaan ATK ditahun sebelumnya,d iperlukan Kebutuhan Alat tulis kantor untuk penunjang administrasi Diskominfotik san
00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	35.262.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000	Perlunya Persediaan logistik untuk penunjang kegiatan rapat rapat diskominfotik san
00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.366.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	
00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.833.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450.000.000	
2. 16 .0 1. 2. 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54 unit</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54 unit</b>	<b>900.000.000</b>	

00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	450.000.000	Sangat diperlukan kendaraan dinas operasional lapangan untuk keperluan tenaga teknis dan peliput lapangan
<b>- Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Tim Peliput dan Operator Infrastruktur Jaringan</b>											
00 05	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Masi kurangnya jumlah Kursi untuk keperluan rapat dan kursi staff
<b>- Pengadaan Kursi Rapat - Pengadaan Kursi 1 badan</b>											
00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 unit	150.000.000	Kurangnya alat pendukung kinerja pegelola administrasi
<b>- Pengadaan table mic - Pengadaan Personal Komputer PC - Pengadaan Laptop - Pengadaan Peralatan Komputer</b>											
00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Masih terdapat sarana dan prasarana yang telah rusak
<b>2. 16 .0 1. 2. 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>660.371.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>750.000.000</b>	

00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000	
						<b>- Belanja biaya Listrik</b> <b>- Belanja Air</b> <b>- Belanja Langganan telpon Kartu halo</b>					
00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	562.371.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000	
						<b>- Tenaga Perencanaan dan Pelaporan (D3 Semua Jurusan)</b> <b>- Tenaga Perencanaan dan Pelaporan (S1 pengalaman 2 Tahun Keatas)</b>					
<b>2. 16 .0 1. 2. 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56 unit</b>	<b>119.670.476</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56 unit</b>	<b>415.000.000</b>	
00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	16.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	25.000.000	
00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	175.000.000	

00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	22.870.476	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	65.000.000	
00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	150.000.000	
2. 16 .0 2	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>86%</b>	<b>3.069.000.000</b>	<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>86%</b>	<b>4.220.000.000</b>	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotiksan</b>	<b>13 Komunitas</b>	<b>3.069.000.000</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Dumai</b>	<b>Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotiksan</b>	<b>13 Komunitas</b>	<b>4.220.000.000</b>	
00 14	Relasi Media	Kota Dumai	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1.838.804.090	Relasi Media	Kota Dumai	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	2.100.000.000	-Penyesuaian pembayaran belanja media cetak, online, offline dan elektronik berdasarkan standar dan spesifikasi media mitra pemerintah - Pembayaran Belanja tenaga editing dan fotographer sesuai dengan

											standar dan spesifikasi
						<b>-Belanja Media Publikasi (Media Cetak, Online, Offline dan Elektronik) yang terverifikasi dewan pers sesuai dengan Standar dan Spesifikasi</b> <b>-Belanja Tenaga Editing dan Photographrer 12n bulan</b> <b>-Belanja Barang dan Jasa penunjang Program pemerintah Daerah</b>					
00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Dumai	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotiksan	13 Komunitas	218.550.220	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Dumai	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotiksan	13 Komunitas	260.000.000	Sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kominfo perlu penambahan Anggaran agar telaksana dan terealisasinya target dengan berjalannya program dan kegiatan
						<b>-Belanja Barang dan Jasa Penunjang IKU Program Diskominfo dan Pemerintah Daerah</b>					
00 17	Pelayanan Informasi Publik	Kota Dumai	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	251.360.900	Pelayanan Informasi Publik	Kota Dumai	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	250.000.000	
						<b>-Belanja Barang dan Jasa Penunjang Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Penyelesaian Sengketa Informasi</b>					
00 20	Diseminasi Informasi	Kota Dumai	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	240.993.000	Diseminasi Informasi	Kota Dumai	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	285.000.000	
						-					

00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	519.291.790	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	1.175.000.000	Sangat dieprlukan kebutuhan anggaran ini untuk mendukung publikasi terkait informasi pemerintah kota dan program-program kepala daerah yang menjadi prioritas
						<b>- Belanja Publikasi Stunting</b> <b>- Belanja Barang dan Jasa Pendukung Publikasi Hari-Hari besar dan Event Besar Pemerintah Kota Dumai</b> <b>- Belanja Penghargaan event logo HUT Kota Dumai</b> <b>- Belanja Barang dan Jasa Video Profil Daerah</b>					
00 24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0 Orang	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Dumai	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	15 Orang	150.000.000	Perlunya diaktifkan kembali sub kegiatan ini dipergunakan untuk penguatan kapasitas SDM terkait informasi agar dapat disosialisasikan ke masyarakat
						<b>- Belanja Bimtek ASN dan Tenaga Ahli Publikasi Informasi</b>					
2. 16 .0 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kota Dumai	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	68,91%	5.884.757.356	Program Aplikasi Informatika	Kota Dumai	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	68,91%	13.218.727.520	

2. 16 .0 3. 02 .0 1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	-	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000	
00 04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0 Dokumen	-	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	100.000.000	Perlunya diaktifkan sub kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi pendukung pelayanan Digitalisasi
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Sub domain dan website bagi perangkat daerah</li> <li>- Honorarium Narasumber dan Pembahas serta panitia pelaksana</li> <li>- Belanja makan dan minuman kegiatan Bimtek dan sosialisasi website</li> <li>- Belanja pendaftaran nama domain pemerintah, instansi Vertikal dan kelurahan</li> <li>- Belanja Penghargaan pengelola website perangkat daerah</li> </ul>					
2. 16 .0 3. 2. 02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	105 Perangkat Daerah	5.884.757.356	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	105 Perangkat Daerah	13.118.727.520	
00 15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Dumai	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	38.725.600	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Dumai	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	200.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Kegiatan Bimtek SPBE</li> <li>- Honorarium Narasumber dan Panitia Pelaksana</li> <li>- Honorarium Tim Asesor SPBE</li> <li>- Honorarium Tim Pengawasan</li> </ul>					

00 16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 dokumen	183.149.048	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 dokumen	300.000.000	
00 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 dokumen	-	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 dokumen	100.000.000	Perlunya diaktifkan kembali sub kegiatan ini dikarenakan perubahan Dokumen Arsitektur sesuai dengan SIA SPBE V.2
						<b>- Belanja Reviu Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Peraturan dari Kemenpan-RB</b>					
00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Dumai	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	41 Aplikasi	338.450.100	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Dumai	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	41 Aplikasi	550.000.000	
						<b>- Pembayaran Tenaga Ahli/Programmer 12 bulan - Honorarium TIM SPBE Kota Dumai - Honorarium PPTK - Belanja Lisensi Landing Page</b>					
00 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	40 Aplikasi	24.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	40 Aplikasi	100.000.000	
						<b>- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 12 bulan - Belanja Lisensi Aplikasi Zoom Meeting - Belanja Lisensi Power BI</b>					

00 23	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 Unit	97.471.020	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 Unit	300.000.000	
00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	105 Perangkat Daerah	5.154.088.508	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	105 Perangkat Daerah	11.418.727.520	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Infrastruktur Fiber Optik di Lingkungan Kota Dumai</li> <li>- Belanja Bandwith jaringan 3gb</li> <li>- Pembangunan Infrastruktur Tower Triangle di Lingkungan Kota Dumai (6 Kelurahan, 6 tower)</li> <li>- Inovasi Tempat Online Masyarakat Kelurahan (Tempoyak)</li> <li>- Belanja Tenaga Ahli dan TKPK 12 bulan</li> <li>- Belanja Honorarium</li> </ul>					
00 27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Kota Dumai	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	48.873.080	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Dumai	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	220.000.000	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Kegiatan Bimtek Smartcity</li> <li>- Honorarium TIM Forum Smartcity Kota Dumai</li> <li>- Honorarium TIM Pelaksana Smartcity</li> </ul>					
2. 20 .0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Dumai	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	198.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Dumai	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	552.500.000	
2. 20 .0 2. 2. 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	198.500.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	552.500.000	

00 08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Dumai	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	55.053.750	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Dumai	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	112.500.000	
<b>-Belanja Jasa Tenaga Operator Statistik 12 bulan</b>											
00 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Dumai	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	55.053.750	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Dumai	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	240.000.000	
<b>- Belanja Kegiatan FGD atau Sosialisasi Satu Data Perangkat Daerah Kota Dumai</b> <b>- Honorarium TIM admin Pengelola Data Statistik Sektoral Kota Dumai</b> <b>- Honorarium TIM internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b> <b>- Honorarium PPTK</b>											
00 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Dumai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	88.392.500	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Dumai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	200.000.000	
<b>-Belanja Kegiatan FGD atau Sosialisasi Meta Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah Kota Dumai</b> <b>- Honorarium TIM admin Pengelola Meta Data Statistik Sektoral Kota Dumai</b> <b>- Honorarium TIM internal Kegiatan Meta data</b>											
2. 21 .0 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Dumai	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	198.500.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Dumai	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	500.000.000	
2. 21 .0 2. 01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	40 Perangkat Daerah	198.500.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	40 Perangkat Daerah	500.000.000	

00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	40.500.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	250.000.000	
						<b>-Belanja Perpanjangan TTE Pejabat Perangkat Daerah Kota Dumai</b> <b>-Belanja Kegiatan ITSA</b> <b>-Belanja Kegiatan Hardening pendukung SPBE</b> <b>-Belanja Honorarium TIM Persandian</b>					
00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 perangkat daerah	158.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 perangkat daerah	250.000.000	
						<b>-Belanja Jasa Tenaga Ahli Persandian (Security Information) 12 bulan</b> <b>-Belanja Lisensi WAF dan A-Panel</b> <b>-Belanja Kegiatan Kontra Penginderaan Keamanan Informasi</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>14,336,993,240</b>					<b>25.596.010.151</b>	

## **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mengikuti rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Namun pada musrenbang Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai tidak mendapatkan usulan atau aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tahap rancangan awal renja 2025.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengambil tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan formasi Sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana”.

Adapun arah kebijakan dan prioritas strategi RPJMN 2020-2024 Bidang Komunikasi adalah Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui strategi :

- a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik;
- b. Penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat;
- c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T;
- d. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi;
- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital;
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya;
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis;

- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Dari ketujuh Strategi Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik ini, ada salah satu program prioritas yang mendukung prioritas nasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yaitu, "Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik".

**VISI PEMBANGUNAN NASIONAL** untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbagunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN NASIONAL**, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai 2025**

Tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan misi pembangunan Kota Dumai, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah Misi ke 4 (empat), yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Mengacu tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada tahun 2025, yaitu Melakukan Pemantapan Terhadap Sistem, Sarana, Potensi dan Sumber Daya Pendukung untuk Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman), telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, antara lain :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktifitas industri dan kepelabuhanan;
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktifitas ekonomi;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, maka disusunlah sasaran yang akan menunjang tujuan dalam rangka pencapaian prioritas tersebut, antara lain :

1. Tersedianya Kebijakan Tata Kelola SPBE yang telah dilegalisasi;
2. Meningkatnya Tata kelola dan Pelayanan SPBE;
3. Percepatan pelaksanaan penggunaan e-office dilingkungan Pemerintah kota Dumai;
4. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur koneksi Jaringan Internet;
5. Lebih optimalnya informasi pemerintah daerah yang tersebar;
6. Meningkatnya Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat;
7. Mengoptimalkan pelayanan dalam menyelenggarakan Statistik sektoral, dan;
8. Meningkatnya penanganan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Indeks Layanan SPBE	Indeks	3.1
			Persentase jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Persentase (%)	68,91
			Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	Persentase (%)	86
			Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase (%)	80
			Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase (%)	80

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan upaya dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 dalam rangka pencapaian misi 4 (empat) Kepala Daerah yaitu, Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terdiri dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang berlokasi di wilayah Kota Dumai.

Adapun tabel rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2025 dan prakiraan maju dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini;

TABEL 3.2  
TC.32.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Pro gra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						25.596.0 10.151			31.442.5 33.414			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.104.78 2.631			7.639.77 7.094			
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						85.500.0 00			118.500. 000			
2	16	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/la poran perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	0 Dokum en	9 Dokum en	-	DAN A TRAN SFER UMU M	Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an	2 Dokumen	10.000.0 00

2	16	01	2.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	9 dokumen	9 dokumen	7.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Dokumen	12.000.000
2	16	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 dokumen	9 dokumen	6.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Dokumen	9.000.000
2	16	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 dokumen	9 dokumen	7.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang</b>	1 Dokumen	8.000.000

						<b>persandi an</b>									<b>persandi an</b>		
2	16	01	2.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 dokumen	9 dokumen	6.000.000	DANA TRANSFER UMUM	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	1 Dokumen	7.500.000
2	16	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kota Dumai	100 %	2 Laporan	9 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	2 Laporan	60.000.000

2	16	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	9 Dokumen	9.500.000	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	1 Laporan	12.000.000		
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												<b>4.059.282.631</b>		<b>4.141.277.094</b>
2	16	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai	100 %	14 orang/bulan	3 dokumen	3.959.282.631	DANA TRANSFER UMUM	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	14 Orang/Bulan	4.031.277.094		

2	16	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 laporan	3 dokumen	50.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Perlu nya Pembaha n Anggaran untu k Kep erlu an Hon orair um 12 bula n	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Laporan	40.000.000
2	16	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Kota Dumai	100 %	2 dokumen	3 dokumen	50.000.000	DAN A TRANSFER UMUM		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	2 Dokumen	70.000.000
2	16	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							30.000.000						30.000.000

2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Untuk keperluan pembayaran honorarium 12 bulan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Laporan	30.000.000
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>280.000.000</b>					<b>350.000.000</b>
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	0 Paket	80 Paket	80.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Pengadaan belanja pakaian dinas untuk keperluan hari besan HUT Kota Dumai, pakaian security dan pakaian dinas	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	80 Paket	100.000.000



2	16	01	2.05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	6 orang	15 orang	100.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Diperlukan Belanja Bimtek untuk sertifikasi pelaksanaan teknis	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	25 orang	125.000.000
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								685.000.000					860.000.000
2	16	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	4 Paket	52 Paket	30.000.000	DAN A TRANSFER UMUM		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	10 Paket	35.000.000

2	16	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	3 Paket	52 Paket	100.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Kurangnya persediaan ATK ditahun sebelumnya, dituliskan kebutuhan Alat tulis kantor untuk penjang adm inistrasi Disk omifotoksan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	10 Paket	200.000.000
---	----	----	------	----------	--	--	--	--	------------	-------	---------	----------	-------------	---------------------	--	--	----------	-------------

2	16	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	<b>Jumlah Kebutuhan Administra si Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	5 Paket	60 Paket	75.000.0 00	DAN A TRAN SFER UMU M	Perl uny a Pers edia an logis tik untu k pen unja ng kegi atan rapa t rapa t disk omi nfoti ksan	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	12 Paket	75.000.0 00
2	16	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	<b>Jumlah Kebutuhan Administra si Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	2 Paket	60 Paket	30.000.0 00	DAN A TRAN SFER UMU M		<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	12 Paket	50.000.0 00

2	16	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Belanja Kegiatan Pendukung Kinerja Pemerintah dan Honorarium PPTK 12 Bulan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Laporan	500.000.000
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							900.000.000					1.050.000.000	
2	16	01	2.07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	3 unit	3 Unit	450.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Sangat diperlukan kendaraan dinas operasional lapangan untuk keperluan tenaga teknis dan pelip	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	3 Unit	600.000.000



2	16	01	2.07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 Unit	1 Unit	150.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Masih terdapat sarana dan prasarana yang telah rusak	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Unit	125.000.000
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								650.000.000					650.000.000
2	16	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 Laporan	5 Laporan	100.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Diperlukan untuk Pembayaran Listrik kantor dan Air di Kantor Data Center (Server)	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	1 Laporan	100.000.000

2	16	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 Lapora n	1 Lapora n	550.000. 000	DAN A TRAN SFER UMU M	Ada nya Pen amb aha n SD M Adm instr asi dan Pere nca naa n dika rena kan masi terd apat keko son gan untu k pela ksan pere nca naa n	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik, dan bidang persandi an</b>	1 Laporan	550.000. 000
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							415.000. 000					440.000. 000	
2	16	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik,</b>	Jumlah Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka	<b>Jumlah Unit Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	1 unit	1 unit	25.000.0 00	DAN A TRAN SFER UMU M	Dip ergu nak an untu k bela nja BB M 12 bula n	<b>Persenta se penunjan g urusan pemerint ahan bidang komunik asi dan informati ka, bidang statistik,</b>	1 unit	25.000.0 00

						dan bidang persandian	n Pajaknya								dan Asuransi Kendaran Dinas Jabatan	dan bidang persandian		
2	16	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Dumai	100 %	3 unit	3 unit	175.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Perlu penambahan dikendalikan adanya kegiatan lapangan untuk setiap bidang merlukan BBM dan pemeliharaan kendaraan	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</b>	3 unit	200.000.000



2	16	02	2.01	00 14	Relasi Media	<p><b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b></p> <p>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</p>	<p><b>Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotik san</b></p>	Kota Dumai	86 %	1 Laporan	13 Komunitas	2.100.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	<p>- Penyesuaian pembayaran belanja media cetak, online, offline dan elektronik berdasarkan standar dan spesifikasi media mitra pemerintah - Pembayaran Belanja tenaga editing dan fotografi</p>	<p><b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b></p>	1 Laporan	2.000.000.000
---	----	----	------	----------	--------------	--	--	------------	------	-----------	--------------	---------------	---------------------	--	---	-----------	---------------

															her sesu ai den gan stan dar dan spe sifi kasi			
2	16	02	2.01	00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	<b>Persenta se Cakupan Pengemb angan Dan Pemberd ayaan Kelompo k Informasi Masyarak at Di Tingkat Kecamat an</b>	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendise minasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	<b>Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendisemi nasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotik san</b>	Kota Dumai	86 %	13 Komun itas	13 Komun itas	260.000. 000	DAN A TRAN SFER UMU M	Seb agai pen duk ung Indik ator Kine rja Uta ma (IKU ) Kom info perl u pen amb aha n Ang gara n agar telak san a dan tere alisa siny a targ et den gan berj alan	<b>Persenta se Cakupan Pengemb angan Dan Pemberd ayaan Kelompo k Informasi Masyarak at Di Tingkat Kecamat an</b>	13 Komunitas	210.000. 000



2	16	02	2.01	00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	<b>Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotik san</b>	Kota Dumai	86 %	2 Media	13 Komun itas	1.175.00 0.000	DAN A TRAN SFER UMU M	Sangat diperlukan kebutuhan anggaran ini untuk mendukung publikasi terkait informasi pemerintah kota dan program-program kepala daerah yang menjadi prioritas	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b>	2 Media	1.157.50 0.000
---	----	----	------	----------	--	--	---	---	---------------	---------	------------	---------------------	-------------------	--------------------------------------	---	--	---------	-------------------

2	16	02	2.01	00 24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	<b>Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</b>	Kota Dumai	86 %	15 Orang	13 Komunitas	150.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Perlu diadakan kegiatan ini dengan untuk penguatan kapasitas SDM terkait informasi agar dapat disosialisasikan ke masyarakat	<b>Persentase Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan</b>	15 Orang	150.000.000
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>												17.884.876.320	
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								100.000.000					
2	16	03	2.01	00 04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	<b>Persentase Akses Jaringan</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama	<b>Jumlah Dokumen Pengelola Nama</b>	Kota Dumai	68,9 1%	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000		Perlu diadakan	<b>Persentase Akses Jaringan Internet</b>	1 Dokumen	300.000.000

					Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	<b>n Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah</b>	Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	<b>Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</b>						DAN A TRANSFER UMUM	ifkan sub kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi pendukung pelayanan Digitalisasi	<b>Yang disediakan Pemerintah Daerah</b>		
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							13.118.727.520					17.584.876.320	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	<b>Persentase Akses Jaringan Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	<b>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Kota Dumai	68,91%	1 Laporan	105 Perangkat Daerah	200.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Bela nja kegiatan sebagai penunjang SPBE untuk Perangkat	<b>Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>	1 Laporan	200.000.000



2	16	03	2.02	00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<b>Persentase Akses Jaringan Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<b>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Kota Dumai	68,9 1%	41 Aplikasi	105 Perangkat Daerah	550.000. 000	DAN A TRAN SFER UMU M	Diperuntukkan pembayaran Tenaga Ahli/Program sertifikasi TKP pelaksana IT Pendukung SPBE 12 bulan dan Honorarium TIM SPBE Kota Dumai dan PPTK sertifikasi Lansi Landing Page	<b>Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>	50 Aplikasi	700.000. 000
---	----	----	------	----------	---	---	--	---	------------	------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

2	16	03	2.02	00 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	<b>Persentase Akses Jaringan Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	<b>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Kota Dumai	68,9 1%	40 Aplikasi	105 Perangkat Daerah	100.000. 000	DAN A TRANSFER UMUM	Dipertukarkan Pembayaran Tenaga Informatika dan Teknologi/TKPK 12 Bulan Dan Belanja Lisen Aplikasi Zoom meeting dan Liseni Power BI	<b>Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>	40 Aplikasi	125.000. 000
2	16	03	2.02	00 23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	<b>Persentase Akses Jaringan Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	<b>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Kota Dumai	68,9 1%	6 Unit	105 Perangkat Daerah	300.000. 000	DAN A TRANSFER UMUM	Dipertukarkan belanja kegiatan Pendukung Smartcity per	<b>Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>	6 Unit	275.000. 000



														(6ke lura han, 6 towe r), Inov asi Tem pat onlin e mas yara kat kelu raha n (Te mpo yak) bela nja tena ga Ahli IT jari ngan/ TKP K 12 bula n dan Hon orari um				
2	16	03	2.02	00 27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	<b>Persenta se Akses Jaringan Internet Yang disediaka n Pemerint ah Daerah</b>	Jumlah implemen tasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterpla n Kabupate	<b>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Kota Dumai	68,9 1%	6 Progra m	105 Perang kat Daerah	220.000. 000	DAN A TRAN SFER UMU M	Dipe runt ukka n bela nja Kegi atan Bimt ek Sma rtcity	<b>Persenta se Layanan Publik Yang Diseleng garakan Secara Online Dan Terintegr asi</b>	6 Program	170.000. 000

						n/Kota Cerdas								Honoriarium Forum Smartcity Tim pelaksana Smartcity				
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							552.500.000					1.068.380.000	
2	16	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>							552.500.000					1.068.380.000	
2	16	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>							552.500.000					1.068.380.000	
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	<b>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</b>	Kota Dumai	80 %	100 %	1 Dokumen	112.500.000	DANA TRANSFER UMUM	Perlu adanya penambahan gaji SD M/otor pelaksana bidang Statistik 12 bulan	<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	100 %	155.342.500

2	20	02	2.01	00 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	<b>Persenta se Penyelen ggaraan Statistik Sektoral</b>	Persentas e kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	<b>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</b>	Kota Dumai	80 %	100 %	1 Dokum en	240.000. 000	DAN A TRAN SFER UMU M	Dipe runt ukka n bela nja kegi atan FGD atau sosi alisa si satu data pera ngk at daer ah kota dum ai, bela nja hon orari um TIM adm in pen gelol a data stati stik sekt oral kota dum ai, Hon orari um PPT K dan TIM inter	<b>Persenta se Penyelen ggaraan Statistik Sektoral</b>	100 %	277.010. 000
---	----	----	------	----------	---	--	---	--	---------------	---------	-------	------------------	-----------------	--------------------------------------	---	--	-------	-----------------



2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						500.000.000					777.000.000		
2	16	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						500.000.000					777.000.000		
2		02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000					777.000.000		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<b>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</b>	Kota Dumai	100%	1 Laporan	40 Perangkat Daerah	250.000.000	DAN A TRANSFER UMUM	Diperuntukkan belanja perpanjangan TTE pejabat Perangkat Daerah, Belanja Kegiatan ITS A, Belanja Kegiatan Har dening Pendukung SPBE	<b>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	1 Laporan	275.000.000

2	21	02	2.01	00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</b>	Kota Dumai	100 %	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM	Diperuntukkan belanja Jasa Tenaga Ahli Persandian 12 bulan, Belanja Lisenensi WAF dan A-Panel, dan Belanja kegiatan Kontra Penginderaan Keamanan Informasi	<b>Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	40 Perangkat Daerah	300.000.000	
												<b>TOTAL</b>							<b>31.442.533.414</b>

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada tahun 2025 mempunyai 5 program, 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - ✓ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - ✓ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - ✓ Sub Kegiatan Relasi Media

- ✓ Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- ✓ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

#### C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

##### 1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas.

#### D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

##### 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

## E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

### 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program, sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota, sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi . Usulan pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp. **25.596.010.151,-**. Sedangkan Pagu Indikatif yang diberi pada tahun 2025 sebesar Rp. 14.336.993.240.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

## **A. Catatan Penting Pelaksanaan Kegiatan**

Proses Penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai ini menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, Prioritas program/kegiatan selain diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi juga diarahkan untuk Pemenuhan dan Kelancaran kebutuhan Pelayanan Digitalisasi Pemerintah Daerah berbasis Elektronik dan mempermudah masyarakat dalam urusan Komunikasi dan Informatika. Pada perkembangannya, pelaksanaan Program dan Kegiatan diharapkan sesuai rencana, namun demikian tetap memperhatikan ketersediaan Anggaran yang disediakan. Namun Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai berharap agar usulan Anggaran untuk memenuhi Kebutuhan Program/Kegiatan dapat dipertimbangkan guna memperlancar pelaksanaan untuk mendukung Program Kepala Daerah Pemerintah Kota Dumai.

## **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kunci sukses pembangunan daerah dalam artian Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat Dokumen Perencanaan ini ditaati oleh seluruh Pelaku Pembangunan dengan Komitmen dan Konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan suatu proses selanjutnya. Disamping itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku Pembangunan (Stakeholder) . Pelaksanaan sesuai rencana yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran juga tetap harus dikedepankan.

## **C. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu serta bagaimana pelaksanaan program kegiatan tersebut oleh masing-masing Bidang. Dengan Instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya dan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah harus menjadi pedoman dan dipahami oleh pelaksana tidak terbatas pada komponen SDM perencanaan dengan demikian komitmen agar tercapai sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025 dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman serta acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Dumai, Januari 2024  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KOTA DUMAI  
  
**Drs. H. KHAIRIL ADLI, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700511 199101 1 001